



## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas pemerintah daerah tahun 2022 difokuskan untuk menjamin ketersediaan bidang kesehatan, bantuan sosial, dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19, serta pengendalian inflasi. Meskipun demikian Badan Pendapatan Daerah tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam,        Februari 2023

**Plt.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710616 199803 1 009**



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Penjelasan Umum Organisasi .....	5
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	6
1.2.2 Aspek Strategis .....	18
1.2.3 Anggaran .....	19
1.3 Dasar Hukum .....	19
1.4 Sistematika Laporan Kinerja .....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	21
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	21
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
3.1 Capaian Kinerja .....	30
3.1.1 Skala Capaian Kinerja .....	30
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan ....	31
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	35
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	37
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota .....	38
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ..	38
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	49
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja .....	49
3.2 Realisasi Anggaran .....	56
BAB IV PENUTUP.....	57
LAMPIRAN .....	59



**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan tahun 2022 .....	19
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Periode 2019-2024 .....	22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	23
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.6 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....	27
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja .....	31
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	31
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 .....	32
Tabel 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unit Pelayanan.....	34
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja .....	35
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Pajak Daerah Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	36
Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	37
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Deli Serdang.....	38
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	39
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	49
Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan .....	50
Tabel 3.12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	56



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	7
Gambar 3.1 Kegiatan Grand Launching aplikasi pembayaran Pajak Daerah Online berbasis android pada tanggal 6 September 2022 di Prime Plaza KNO Hotel diresmikan oleh Bupati Deli Serdang serta Sosialisasi ke UPT Kecamatan untuk aplikasi tersebut. ....	41
Gambar 3.2 Rapat penagihan piutang PBB, dan penagihan sabtu minggu pada triwulan 2 s/d 4 tahun 2022.....	42
Gambar 3.3 Penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri pada 1 April 2022 .....	42
Gambar 3.4 MoU dengan BPN pada 2 Nopember 2022 .....	43
Gambar 3.5 Stiker tunggakan PBB pada bulan September s/d Desember 2022.....	44
Gambar 3.6 Penertiban reklame di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Tanjung Morawa, Batang Kuis pada bulan Juli sd November 2022 .....	45
Gambar 3.7 Stiker pemberitahuan restoran pada triwulan 2-3 .....	45
Gambar 3.8 Penagihan aktif keliling dusun-gang triwulan 3 s/d 4 tahun 2022 .....	46
Gambar 3.9 Penagihan aktif door to door pada triwulan 3-4.....	46
Gambar 3.10 Penagihan aktif sabtu minggu pada triwulan 3-4.....	47
Gambar 3.11 Kegiatan validasi PBB pada Januari 2022 .....	47
Gambar 3.12 Spanduk stimulus penghapusan denda dari 1994 sd 2020.....	48



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pendapatan Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

### 1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Pendapatan Daerah :



### **1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang dalam menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

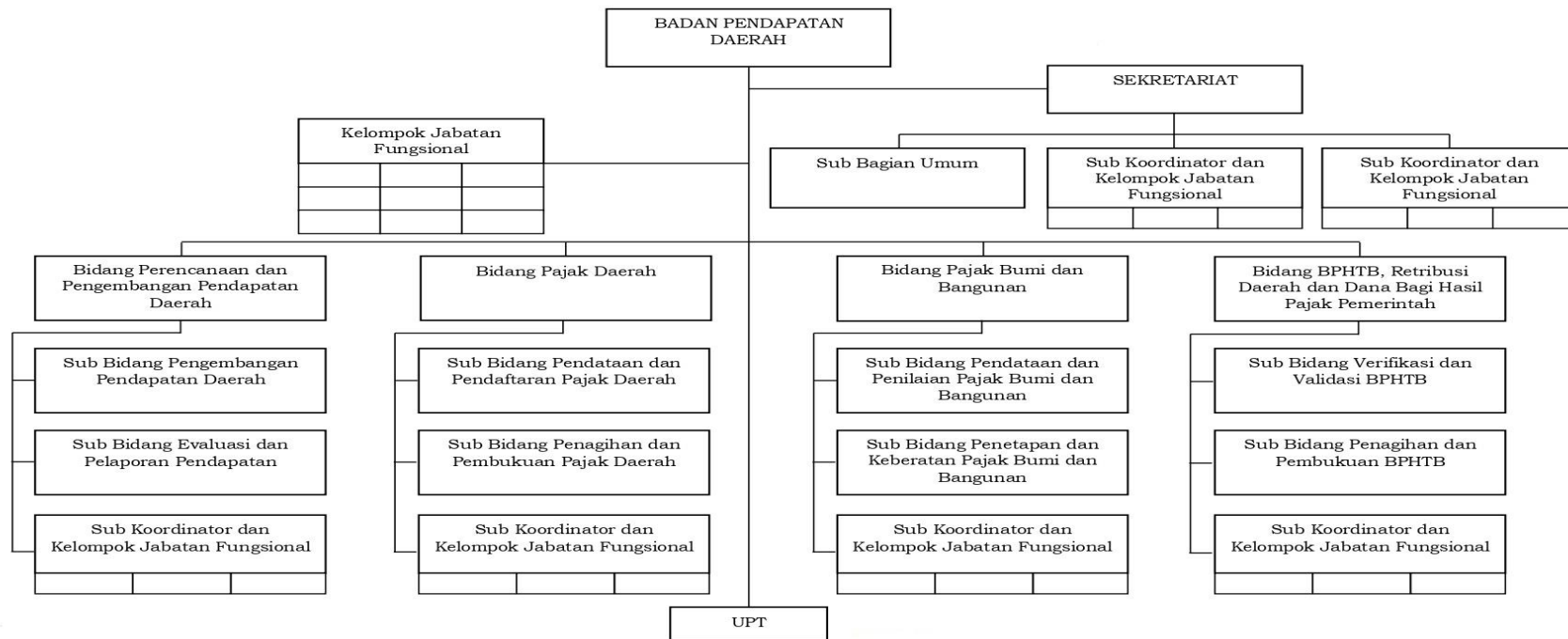
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait Pendapatan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber Data : Perbup Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Tupoksi Badan Pendapatan Daerah



**1. Kepala Badan Pendapatan Daerah** mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas :

1. Menetapkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah serta perubahannya;
3. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah serta Unit Pelaksana Teknis;
4. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
5. Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
6. Menetapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
7. Menetapkan verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
8. Menetapkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
9. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak atau Denda Administrasi;
10. Memonitor dan evaluasi perkembangan penerimaan pendapatan daerah;
11. Mengoordinasikan penyusunan APBD di bidang pendapatan daerah dengan instansi terkait;
12. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Badan;
13. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.





**2. Sekretaris** mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
2. Pelaksanaan tugas Sekretariat Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
2. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
5. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
6. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Pendapatan Daerah;
7. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
8. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**3. Kepala Sub Bagian Umum** mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Badan;



4. Melaksanakan pengelolaan aset Badan;
5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen pada Badan;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
7. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
9. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan, serta penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara pada Badan;
10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;
11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. Merumuskan kajian teknis perencanaan potensi pendapatan daerah;
3. Merumuskan produk hukum pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
4. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
5. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
6. Mengevaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;



7. Melakukan evaluasi realisasi pendapatan daerah;
8. Mengoordinasikan data evaluasi pendapatan daerah yang telah diawasi dalam rangka pemeriksaan pendapatan daerah dengan bidang terkait;
9. Melaksanakan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
10. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
11. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**5. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah** mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Menyusun bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
3. Menyusun data koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
4. Menyusun kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
5. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
6. Menyusun data hasil pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**6. Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah** mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;



## **LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

2. Menyusun bahan pelaporan realisasi pendapatan;
3. Menyusun data tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang disampaikan dari bidang terkait;
4. Menyusun data evaluasi dan koordinasi pendapatan daerah;
5. Menyusun data evaluasi penerimaan daerah yang belum tertagih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun data evaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **7. Kepala Bidang Pajak Daerah** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pajak Daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pajak Daerah.

#### Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
2. Merumuskan Pajak Daerah;
3. Memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
4. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
5. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
6. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Daerah atau Denda Administrasi;
7. Mengoordinasikan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak;



8. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak daerah dengan bidang terkait;
9. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan pendaftaran;
10. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan, keberatan, pembatalan dan angsuran;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Daerah;
12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Daerah;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**8. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran Pajak Daerah** mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
2. Meneliti formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
3. Meneliti data formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak;
4. Melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
5. Menyusun daftar induk wajib pajak dan menerbitkan NPWPD;
6. Menyusun data hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**9. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Pembukuan Pajak Daerah** mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak daerah;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
4. Meneliti data permohonan banding, penghapusan atau pengurangan, dan restitusi pajak daerah;
5. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;



6. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak daerah;
7. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**10. Kepala Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan;
2. Penyiapan bahan koordinasi Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memvalidasi pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
3. Memvalidasi penetapan objek pajak bumi dan bangunan;
4. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan;
5. Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
6. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau Denda Administrasi;
9. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dengan bidang terkait;
10. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan



16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**11. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan** mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
3. Meneliti formulir /SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
4. Meneliti data formulir/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak bumi dan bangunan;
5. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan di lapangan;
6. Menyusun penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
7. Melaksanakan entry data hasil pelayanan pajak bumi dan bangunan dan perubahan peta;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**12. Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan** mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak bumi dan bangunan;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, pembatalan dan angsuran pajak bumi dan bangunan;
4. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
5. Menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran;
6. Menyusun data informasi objek dan subjek penetapan pajak bumi dan bangunan;
7. Meneliti data permohonan keberatan, angsuran dan pembatalan SPPT PBB;



8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**13. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
2. Penyiapan bahan koordinasi dalam Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah

Uraian tugas :

1. Merumuskan program dan kegiatan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
2. Memvalidasi dan verifikasi pembayaran BPHTB;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
4. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Restitusi BPHTB;
5. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan BPHTB;
6. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar BPHTB;
7. Mengoordinasikan pembukuan realisasi dan tunggakan BPHTB dengan bidang terkait;
8. Melaksanakan kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
9. Mengoordinasikan penetapan anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
10. Mengoordinasikan pembukuan data realisasi retribusi daerah dengan bidang terkait;
11. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;





12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**14. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB** mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
3. Meneliti data dalam surat setoran BPHTB dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan;
4. Menyusun data pembayaran BPHTB yang perlu dilakukan validasi lapangan;
5. Menyusun data dan informasi verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
6. Menyusun kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
7. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**15. Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Pembukuan BPHTB** mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
2. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar;
3. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
4. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan BPHTB;
5. Meneliti permohonan keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
6. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan BPHTB;
7. Menyusun data Surat Setoran BPHTB per bulan sesuai penerimaan rekening koran pada bank persepsi;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;



9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **1.2.2 Aspek Strategis**

Kemandirian suatu daerah untuk membangun daerahnya melahirkan strategi-strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, baik dari sektor pajak maupun retribusi. Arah kebijakan yang ditempuh sebagai strategi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. Pendapatan daerah memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Peran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan pembangunan Deli Serdang yang maju dan sejahtera sangat signifikan mengingat Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD fungsi keuangan terkait pendapatan daerah untuk mencari sumber-sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Strategi peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah merupakan strategi yang diterapkan guna peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah nantinya diharapkan bahwa pemerintah daerah secara bertahap dapat mengurangi ketergantungannya dari pemerintah pusat dan propinsi. Peran strategis Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan di luar pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.
3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah penghasil pendapatan daerah.
4. Pemanfaatan data, sistem informasi yang berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah.



### 1.2.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah. Berikut adalah anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah :

**Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Sumber	Tahun	Jumlah	
		(3)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
APBD	Tahun 2021	Rp. 54.975.042.351,-	Rp. 54.107.965.322,-
APBD	Tahun 2022	Rp. 60.076.519.721,-	Rp. 60.644.468.044,-
Sumber Lainnya (jika ada)		Rp. -	Rp. -

### 1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang



## **1.4 Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam RPJMD 2019 – 2024 disebutkan Visi Kabupaten Deli Serdang adalah :

***“Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam ke Bhinekaan”.***

Dengan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan terkait pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-2 yaitu *"Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif"*.

Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah adalah Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 - 2024**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah			5%	5%	5%	5%	5%
			Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat			77 poin	78 poin	79 poin	80 poin	81 poin
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 poin	78 poin	79 poin	80 poin	81 poin
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	78 poin

Sumber : BA Reviu Renstra Badan Pendapatan Daerah 2022-2024

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	1.1	Persentase penerimaan pajak daerah	Persentase	Perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa target penerimaan pajak daerah dapat tercapai agar program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang yang telah direncanakan pada APBD dapat dilaksanakan seluruhnya. Dengan acuan target pajak daerah pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan kebutuhan belanja daerah yang juga meningkat setiap tahun, sebagai salah satu sumber pendanaan APBD Kabupaten Deli Serdang diharapkan realisasi pajak daerah juga mengalami kenaikan capaian setiap tahunnya.	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
		2.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja	Nilai LHE AKIP dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Periode 2022



## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat didalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 :

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)				(6)	(7)
1	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah			Persentase	5
			Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	Persentase	100
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat			Poin	79
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	74

Sumber : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun perjanjian kinerja oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :





**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah :

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	<b>Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 poin</b>
<b>I.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>2 sub kegiatan</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan	2 Jenis
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKIP)	1 dokumen
<b>I.1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>3 sub kegiatan</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	132 OB
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	130 dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	45 Set
<b>II</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>79 poin</b>
<b>II.1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>1 sub kegiatan</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	100 Stel
<b>II.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>7 sub kegiatan</b>



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

	<b>Daerah</b>		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor	2 Jenis
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17 Jenis
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4020 Eks
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah LapBahan Makanan dan Minuman Tamu	7 Jenis
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	815 OH
<b>II.1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>1 sub kegiatan</b>
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 Jenis
<b>II.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>4 sub kegiatan</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Materai	2000 Buah
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air, dan Listrik	3 Jenis
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180 Unit
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Petugas Kebersihan dan Keamanan	130 OB
<b>II.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>2 sub kegiatan</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	20 unit
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara	1100 m2
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>100 persen</b>
<b>III.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>12 sub kegiatan</b>
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang disusun	7 Kebijakan
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	500 Orang
3.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Baru yang Tersedia	363 WP
4.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	4 Aplikasi



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

5.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak PBB yang Terdata dan Dinilai	16.134 OP PBB
6.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP Pajak Daerah yang Ditetapkan	2491 WP
7.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP yang Terlayani	35.119 WP
8.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Verifikasi dan Validasi	18.985 WP
9.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP yang Tertagih	449.671 WP
10.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah WP PBB yang Ditetapkan (SPPT)	431.975 WP
11.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Data Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah	12 Bulan
12.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	12 Bulan

**Tabel 2.6 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 poin</b>
<b>I.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>2 sub kegiatan</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen
<b>I.1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>3 sub kegiatan</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1428 OB
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	130 dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
<b>II</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>79 poin</b>
<b>II.1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>1 sub kegiatan</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

<b>II.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>1 sub kegiatan</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 paket
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 paket
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4020 dokumen
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	12 laporan
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 laporan
<b>II.1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>2 sub kegiatan</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit
2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	143 unit
<b>II.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>4 sub kegiatan</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 laporan
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	206 laporan
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40 laporan
<b>II.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>2 sub kegiatan</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>100 persen</b>
<b>III.1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>13 sub kegiatan</b>
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 laporan
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan	35 unit



### LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

	Pengelolaan Pajak Daerah	Pajak Daerah	
4.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	17307 laporan
5.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	19800 laporan
6.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60 objek pajak
7.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	455987 dokumen
8.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	62540 layanan
9.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	50873 dokumen
10.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	473835 dokumen
11.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 dokumen
12.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	17083 dokumen
13.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	384 laporan

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewaiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang di tetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **3.1.1 Skala Capaian Kinerja**

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :



**Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Hasil Pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	63,89%	63,89 %	Rendah	Laporan Bendahara Penerimaan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	80,03 poin	101,30 %	Sangat tinggi	Laporan IKM Bapenda
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin	60,15 poin	81,28 %	Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi Sakip Bependa
<b>Rata-rata % Capaian</b>					<b>82,16 %</b>	<b>Tinggi</b>	

Sumber : Laporan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Jika dilihat dari tabel di atas, rata-rata persentase capaian termasuk dalam kategori tinggi.

1. Sasaran strategis : meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan acuan target pajak daerah pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka realisasi pajak daerah juga diharapkan mengalami kenaikan capaian setiap tahun. Capaian kinerja sasaran ini hanya tercapai 63,89% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator sasarannya : persentase penerimaan pajak daerah. Indikator tersebut digunakan untuk memastikan bahwa persentase penerimaan pajak daerah dapat tercapai, agar



program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang yang telah direncanakan pada tahun 2022 dapat dilaksanakan seluruhnya terutama untuk belanja daerah yang bersumber dari pendanaan pajak daerah. Dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022**

No	Jenis Penerimaan Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	8.247.975.000,00	5.997.886.543,00	72,72
2	Pajak Restoran	38.750.000.000,00	35.612.706.786,00	91,90
3	Pajak Hiburan	5.200.000.000,00	6.231.245.474,00	119,83
4	Pajak Reklame	17.500.000.000,00	11.283.642.306,00	64,48
5	Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000,00	203.334.563.003,00	68,90
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	30.000.000.000,00	1.042.473.810,00	3,47
7	Pajak Parkir	13.000.000.000,00	6.645.503.456,00	51,12
8	Pajak Air Tanah	18.000.000.000,00	22.128.115.376,40	122,93
9	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	10.600.000,00	14,13
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	507.219.272.055,00	217.210.595.465,00	42,82
	- Pokok Tahun Berjalan	255.000.000.000,00	190.666.078.095,00	74,77
	- Pokok Piutang	252.219.272.055,00	26.544.517.370,00	10,52
11	Pajak BPHTB	268.500.000.000,00	258.172.195.926,00	96,15
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.201.597.247.055,00</b>	<b>767.669.528.145,40</b>	<b>63,89</b>

- 1) Pajak Hotel dari target Rp. 8.247.975.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.997.886.543,- atau sebesar 72,72% dari target.
- 2) Pajak Restoran dari target Rp. 38.750.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.35.612.706.786,- atau sebesar 91,90% dari target.
- 3) Pajak Hiburan dari target Rp. 5.200.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.6.231.245.474,- atau sebesar 119,83% dari target.
- 4) Pajak Reklame dari target Rp. 17.500.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.11.283.642.306,- atau sebesar 64,48% dari target.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dari target Rp. 295.105.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.203.334.563.003,- atau sebesar 68,90 % dari target.





## LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target Rp. 30.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.042.473.810,- atau sebesar 3,47 % dari target.
- 7) Pajak Parkir dari target Rp. 13.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 6.645.503.456,- atau sebesar 51,12 % dari target.
- 8) Pajak Air Tanah dari target Rp. 18.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.22.128.115.376,40 atau sebesar 122,93 % dari target.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet dari target Rp. 75.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.10.600.000,- atau sebesar 14,13 % dari target.
- 10) Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dari target Rp. 507.219.272.055,- dapat terealisasi sebesar Rp. 217.210.595.465,- atau sebesar 42,82 % dari target. Dengan realisasi pokok tahun berjalan sebesar 74,77% dan pokok piutang sebesar 10,52%.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp.268.500.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 258.172.195.926,- atau sebesar 96,15 % dari target.

Pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah sebesar 63,89% dari target yang direncanakan sebesar 100%. Dengan capaian masing-masing pajak daerah ada yang melampaui, ada juga yang tidak tercapai. Hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing rincian jenis pajak dapat diketahui bahwa 2 jenis pajak yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah memiliki capaian kinerja di atas 100 % dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk jenis pajak lain capaian kinerjanya bervariasi dan belum memenuhi target. Untuk capaian jumlah nilai pajak tertinggi bersumber dari penerimaan pajak BPHTB sebesar Rp. 258.172.195.926,- (*dua ratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*).

2. Capaian kinerja sasaran strategis ke-2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah.
  - Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 101,30% dengan kategori sangat tinggi. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan teknik pemberian questioner kepada pengguna layanan pajak daerah, baik dengan pengisian sendiri maupun dengan wawancara tatap muka secara kunjungan ke perusahaan atau tempat usaha dan di Kantor UPT pelayanan pajak daerah wilayah kecamatan se Kabupaten Deli Serdang. Dengan rincian per unit pelayanan berikut :



Tabel 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unit Pelayanan

No	Jenis/Unit Pelayanan	Semester I		Semester II	
		IKM per Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	IKM per Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Pajak Hotel	78,26	Baik	78,19	Baik
2	Pajak Restoran	81,27	Baik	80,02	Baik
3	Pajak Hiburan	83,25	Baik	81,07	Baik
4	Pajak Reklame	86,91	Baik	78,96	Baik
5	Pajak Penerangan Jalan	81,59	Baik	84,18	Baik
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	82,56	Baik	77,70	Baik
7	Pajak Parkir	77,50	Baik	77,41	Baik
8	Pajak Air Tanah	81,33	Baik	79,31	Baik
9	Pajak Sarang Burung Walet	75,39	Kurang Baik	86,03	Baik
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	77,85	Baik	76,28	Kurang Baik
11	Pajak BPHTB	76,59	Baik	81,22	Baik
	<b>Nilai Rata-Rata (NRR)</b>	<b>80,23</b>	<b>Baik</b>	<b>80,03</b>	<b>Baik</b>
	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>
	<b>Nilai IKM Tahun 2022</b>	<b>80,03 Poin</b>			

Mayoritas masyarakat pengguna layanan menilai prosedur pelayanan dinilai mudah, persyaratan pelayanan dinilai sesuai, kecepatan pelayanan dinilai cepat, kesesuaian biaya/tariff dinilai sesuai, ketepatan pelayanan dinilai sesuai, kemampuan/kompetensi dinilai kompeten, kesopanan dan keramahan pelayanan dinilai sopan dan ramah, penanganan pengaduan pelayanan memberikan pendapat dikelola dengan baik.

- Indikator sasaran ke-2 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah tercapai 81,28% dengan kategori tinggi. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang selaku evaluator. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka



pendek sampai dengan pencapaian kinerja. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya.

**3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 dan tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	67,63 %	56,58%	100%	63,89%	63,89%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,48 poin	79,02 poin	79 poin	80,03 poin	101,30 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		67,57 poin	74 poin	60,15 poin	81,28 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

1. Sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, persentase capaian sarannya pada tahun 2022 sebesar 63,89% lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,31%, tetapi jika dibandingkan tahun 2020 lebih rendah capaiannya. Dapat dilihat dari masing-masing capaian pajak daerah sebagai berikut :



**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Pajak Daerah Tahun 2020, 2021 dan 2022**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2021 Setelah Perubahan			Tahun Anggaran 2022 Setelah Perubahan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	7.225.000.000	3.143.851.937,00	43,51	7.647.975.000	4.568.731.781	59,74	8.247.975.000	5.997.886.543,00	72,72
2	Pajak Restoran	35.275.000.000	18.500.845.680,13	52,45	38.000.000.000	21.692.359.275	57,09	38.750.000.000	35.612.706.786,00	91,90
3	Pajak Hiburan	2.975.000.000	1.728.960.967,00	58,12	4.000.000.000	1.451.776.607	36,29	5.200.000.000	6.231.245.474,00	119,83
4	Pajak Reklame	13.600.000.000	6.881.984.169,00	50,60	15.000.000.000	10.996.152.449	73,31	17.500.000.000	11.283.642.306,00	64,48
5	Pajak Penerangan Jalan	287.471.250.000	172.394.738.790,00	59,97	295.105.000.000	183.793.206.292	62,28	295.105.000.000	203.334.563.003,00	68,90
6	Pajak Bahan Galian Gol.C	11.900.000.000	743.346.884,00	6,25	36.000.000.000	5.182.008.132	14,39	30.000.000.000	1.042.473.810,00	3,47
7	Pajak Parkir	8.925.000.000	4.982.667.354,00	55,83	11.000.000.000	4.111.433.217	37,38	13.000.000.000	6.645.503.456,00	51,12
8	Pajak Air Tanah	12.750.000.000	6.016.319.386,00	47,19	19.000.000.000	6.390.450.844	33,63	18.000.000.000	22.128.115.376,40	122,93
9	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	12.600.000,00	25,20	50.000.000	17.700.000	35,40	75.000.000	10.600.000,00	13,47
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	259.250.000.000	184.662.461.562,00	71,23	512.719.272.055	192.217.130.174	37,49	507.219.272.055	217.210.595.465,00	42,82
11	Pajak BPHTB	242.250.000.000	197.248.899.169,64	81,42	250.000.000.000	242.041.888.735	96,82	268.500.000.000	258.172.195.926,00	96,15
	<b>JUMLAH</b>	<b>881.671.250.000</b>	<b>596.316.675.898,77</b>	<b>67,63</b>	<b>1.188.522.247.055</b>	<b>672.462.837.506</b>	<b>56,58</b>	<b>1.201.597.247.055</b>	<b>767.669.528.145,40</b>	<b>63,89</b>

Nilai capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 63,89 % dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 767.669.528.145,40

Nilai capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 56,58 % dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 672.462.837.506,-

Nilai capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 67,63 % dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 596.316.675.898,77

Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan 7,31% sebesar Rp. 95.206.690.639,40 (*sembilan puluh lima milyar dua ratus enam juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan empat puluh sen*) dibandingkan tahun 2021 dan mengalami penurunan persentase -3,74% dengan kenaikan jumlah sebesar Rp. 171.352.852.246,63 (*seratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam enam tiga sen*) dibandingkan tahun 2020.



2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
- Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian tahun 2022 sebesar 80,03 poin lebih besar dibandingkan tahun 2021 sebesar 79,02 poin, ada peningkatan capaian sebesar 1,01 poin. Juga jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaiannya lebih besar pada tahun 2022.
  - Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah capaian tahun 2022 sebesar 60,15 poin lebih kecil dibandingkan tahun 2021 sebesar 67,57 poin.

### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5 *100
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	63,89%	100%	63,89
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,03 poin	81,00 poin	98,80
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	60,15 poin	78,00 poin	77,12

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

1. Sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 100 % , tingkat kemajuan tahun 2022 baru mencapai 63,89 %.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :
  - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 81 poin tingkat kemajuan tahun 2022 sudah mencapai 98,80 %.
  - Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 78 poin tingkat kemajuan tahun 2022 baru mencapai 77,12 %



### 3.1.5 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Deli Serdang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Kabupaten	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	63,89%	100%	63,89 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,03 poin	67,21 poin	119,07 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	60,15 poin	64,39 poin	93,42 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Disebabkan tidak adanya standar nasional yang mengatur terhadap sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah, maka realisasi kinerjanya hanya bisa dibandingkan dengan standar Kabupaten Deli Serdang berupa nilai capaian Kabupaten untuk tahun 2022.

1. Sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, Kabupaten Deli Serdang tidak menetapkan standar tetapi menerapkan persentase penerimaan pajak daerah tercapai 100% agar program/kegiatan yang telah direncanakan pada APBD 2022 dapat dilaksanakan seluruhnya terutama yang menggunakan sumber dana dari penerimaan PAD. Tetapi persen capaiannya tahun 2022 hanya mencapai 63,89%.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah :
  - Indikator IKM, nilai IKM Kabupaten sebesar 67,21 poin jika dibandingkan nilai IKM Badan Pendapatan Daerah 80,03 poin maka persentase capaiannya sebesar 119,07 %.
  - Indikator nilai LHE AKIP, nilai AKIP Kabupaten sebesar 64,39 poin jika dibandingkan nilai LHE AKIP Badan Pendapatan Daerah 60,15 poin maka persentase capaiannya sebesar 93,42%.

### 3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	63,89%	63,89%	Belum tergalinya semua potensi pajak daerah	Pendataan ke lapangan, Kerjasama dengan BPN dalam pembuatan peta ZNT, pemanfaatan data peta ZNT.
						Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak	Penagihan aktif di desa dan dusun (door to door).
						Lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh	Penertiban reklame & penempelan stiker untuk restoran dan bangunan yang belum membayar pajak.
						Belum adanya reward dan punishment bagi wajib pajak	Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak daerah. Stimulus keringanan pelunasan pajak tanpa denda dan perpanjangan jatuh tempo.
						Kualitas penagihan piutang masih belum maksimal	Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam hal penagihan tunggakan pajak daerah.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	80,03 poin	101,30 %	Meningkatnya kualitas pelayanan online	Pengembangan aplikasi terintegrasi, pembayaran virtual account
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin	60,15 poin	81,28 %	Masih kurangnya perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja internal

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Penyebab tidak tercapainya sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan persentase penerimaan pajak daerah sebesar 63,89 % sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi dan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat rendah dan berpengaruh pada berbagai penerimaan pajak daerah baik pajak hotel, restoran, hiburan maupun parkir.



2. Berkurangnya pendapatan/omset wajib pajak dikarenakan fluktuasi kenaikan harga pangan sedangkan harga jual kepada konsumen tidak naik.
3. Belum tergalinya semua potensi pajak daerah, ada beberapa potensi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, ataupun sudah melaporkan omset namun belum membayar pajaknya.
4. Berdasarkan data hasil penerbitan izin reklame banyak potensi yang hilang dari jenis objek bando, baliho, billboard, shop sign, neon box dan PNT.
5. Pemasangan papan reklame di tahun 2022 ini hanya bersifat temporer (dalam jangka waktu tidak lama).
6. Di era digital ini, banyak produk yang mengiklankan produknya melalui media sosial/iklan digital dan elektronik karena memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga papan reklame jenis billboard dan baliho sangat berkurang.
7. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN tanpa dilampirkan rincian pembayaran listrik per pelanggan, sehingga tidak diketahui pelanggan yang belum atau sudah disetorkan PPJ nya oleh PLN.
8. Banyaknya pengusaha mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin pertambangan yang dilakukan secara ilegal dan insidentil.
9. Tidak adanya kepastian hukum tentang penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin dapat ditagih pajaknya atau tidak.
10. Realisasi pajak parkir sebagiannya diperoleh dari penyelenggaraan tempat parkir yang tidak melakukan pemungutan pembayaran (parkir gratis) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, BRI, Bank Sumut sehingga perhitungan besar pajak parkir sesuai perda belum dapat optimal.
11. Pemilik usaha sarang burung walet sulit ditemui keberadaannya dan masa panen yang tidak diketahui waktunya.
12. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak.
13. Tidak semua wajib pajak jujur dalam melaporkan/mencantumkan harga transaksi pada akta jual beli tanah/bangunan.
14. Lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
15. Masih kurangnya penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah ke masyarakat.
16. Belum adanya reward dan punishment bagi wajib pajak.
17. Kualitas penagihan piutang masih belum maksimal.





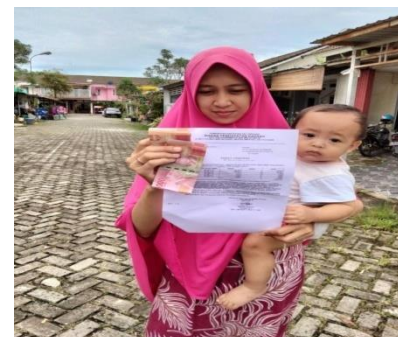
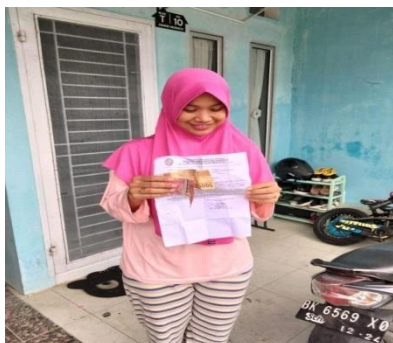
Berbagai upaya dan solusi telah dilakukan untuk mencapai target sasaran tersebut sebagai berikut :

1. PBB Pajak Daerah Deli Serdang e-PADI, yang merupakan pembayaran pajak daerah secara online (virtual account) maka pengembangan sistem aplikasi sudah dapat diakses melalui smartphone berbasis android bersama PT Bank Sumut sehingga menambah kanal pembayaran online agar masyarakat melalui android bisa dengan mudah langsung melakukan pembayaran melalui fasilitas mobile banking. Saat ini pelayanan pembayaran melalui aplikasi ini masih terbatas pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan saja, untuk pajak daerah lainnya sedang dalam proses penyesuaian oleh pihak Bank Sumut dan ditargetkan masyarakat akan bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi ini di tahun depan.



Gambar 3.1 : kegiatan Grand Launching aplikasi pembayaran Pajak Daerah Online berbasis android pada tanggal 6 September 2022 di Prime Plaza KNO Hotel diresmikan oleh Bupati Deli Serdang serta Sosialisasi ke UPT Kecamatan untuk aplikasi tersebut.

2. Penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak daerah, piutang PBB-P2. Para UPT Pelayanan Pajak Daerah wilayah kecamatan se Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak daerah. Data piutang PBB-P2 per kecamatan dapat diakses oleh petugas UPT Wilayah Kecamatan sehingga proses pencetakan surat pemberitahuan tersebut melalui e-PADI berbasis web dimana data NOP, nama objek/subjek pajak, alamat objek/subjek pajak serta jumlah piutang ditandatangani oleh Kepala UPT Kecamatan untuk kemudian disampaikan sesuai alamat objek/subjek pajak.





Gambar 3.2 : rapat penagihan piutang PBB, dan penagihan sabtu minggu 1 pada triwulan 2 s/d 4 tahun 2022

Kegiatan ini sekaligus pendataan untuk Pengklasifikasian piutang PBB-P2 oleh petugas UPT Pelayanan Pajak Daerah wilayah Kecamatan berdasarkan data kegiatan verifikasi dan validasi pada tahun 2017, kemudian petugas melakukan penginputan data dan sekaligus pengklasifikasian K1, K2, K3, K4, K5 dan atau K6 melalui web e-PADI. Data ini akan menjadi bahan pemutakhiran database PBB-P2 dalam rangka pemeliharaan basis data Pajak Daerah.

3. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam hal penagihan tunggakan pajak daerah.



Gambar 3.3 : Penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri pada 1 April 2022

4. Pengembangan aplikasi terintegrasi dengan stakeholder lain melalui penandatanganan MoU antara Bapenda Deli Serdang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB. Dalam kesepakatan ini terdapat point kerjasama pembuatan Peta ZNT, pemanfaatan data Peta ZNT serta kerjasama



## *LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022*

pembaharuan peta ZNT. Dengan kerjasama ini diharapkan Peta ZNT dan Kantor Pertanahan bisa sinkron sehingga memberikan asas keadilan kepada masyarakat, data peta yang akurat serta penerimaan pajak daerah lebih terukur dan optimal.



*Gambar 3.4 : MoU dengan BPN pada 2 Nopember 2022*

5. Melakukan penegakan hukum dan sanksi sosial bagi wajib pajak penunggak melalui penempelan stiker.
  - Penempelan stiker dilaksanakan oleh seluruh UPT Pelayanan Pajak Daerah untuk objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan dan belum membayar PBB-P2 dengan jumlah diatas Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).



Gambar 3.5 : stiker tunggakan PBB pada bulan September s/d Desember 2022

- Penertiban reklame, yaitu memotong, menurunkan spanduk, baliho dan atau media reklame yang tidak melakukan pembayaran pajak reklame.





Gambar 3.6 : penertiban reklame di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Tanjung Morawa, Batang Kuis pada bulan Juli sd November 2022

- Penempelan stiker untuk restoran/rumah makan/cafe yang belum membayar pajak restoran.



Gambar 3.7 : stiker pemberitahuan restoran pada triwulan 2 - 3



6. Melakukan penagihan aktif di desa dan dusun, dengan cara :
- Petugas UPT wilayah kecamatan berkeliling menyusuri gang-gang, dusun-dusun melalui toa/pengeras suara mengingatkan warga untuk segera membayar pajak PBB-P2 sebelum jatuh tempo, adanya penghapusan denda dan menginformasikan tempat pembayaran yang terdekat bagi warga sekitar.



Gambar 3.8 : penagihan aktif keliling dusun-gang triwulan 3 s/d 4 tahun 2022

- Melakukan penagihan door to door oleh petugas UPT pelayanan pajak daerah wilayah kecamatan berkoordinasi dengan kecamatan, membuka loket loket tambahan di Kantor Desa, tempat keramaian, rumah warga dengan memanfaatkan sistem pembayaran e-PADI berbasis web.



Gambar 3.9 : penagihan aktif door to door pada triwulan 3-4



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

- Mengerahkan seluruh pegawai Bapenda ASN dan Non ASN agar turun ke desa/dusun melalui SPT Kepala Badan Pendapatan Daerah khusus pada hari sabtu dan minggu untuk melakukan penagihan ke kecamatan yang luas dan berpotensi besar didampingi pihak desa dan dusun.



Gambar 3.10 : penagihan aktif sabtu minggu pada triwulan 3-4

7. Membentuk tim optimalisasi pajak daerah bersama dengan perangkat daerah lainnya yaitu Dinas PMPTSP dan Kantor Satpol PP untuk melakukan validasi data PBB-P2 ke perusahaan berpotensi yang diketahui belum melakukan update data bangunan.





Gambar 3.11 : kegiatan validasi PBB pada Januari 2022

8. Meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2, memberikan stimulus keringanan pelunasan pajak kepada warga dengan menghapus denda/administrasi PBB-P2.



Gambar 3.12 : spanduk stimulus penghapusan denda dari 1994 sd 2020





### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atau penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			%	Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	100%	63,89%	63,89%	15.779.757.224,-	14.156.950.711,-	89,72 %	71,21 %	10,28 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	80,03 poin	101,30 %	5.806.586.144,-	4.766.838.014,-	82,09 %	123,40%	17,91 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 poin	60,15 poin	81,28 %	690.752.590,-	685.738.000,-	99,27 %	81,88 %	0,73 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran maka dapat dilihat bahwa :

1. Sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah dengan capaian kinerja 63,89% dan capaian anggaran 89,72%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 10,28% dan inefisiensi penggunaan sumber daya 28,79%.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah untuk indikator :
  - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 101,30% dan capaian anggaran 82,09%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 17,91% dan efisiensi penggunaan sumber daya 23,40%.
  - Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 81,28% dan capaian anggaran 99,27%, menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 0,73% dan inefisiensi penggunaan sumber daya 18,12%.

### 3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel berikut ini :



Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	81,28 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP	81.28		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan	100		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 dan Stimulus untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104,62	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,30 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	101.3		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	100	Tidak	



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

					Kunjungan Tamu		Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	94,41	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa sebagai Sarana untuk Mendukung



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

								Pencapaian Sasaran
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33.50	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Tidak Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	
	<b>Meningkatnya penerimaan pajak daerah</b>	<b>Persentase penerimaan pajak daerah</b>	<b>63,89 %</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>63.89</b>		
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>532.42</b>		
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	162,50	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	168,22	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	115,40	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	141,67	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	106,88	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	664,48	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	35,01	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	74,71	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Penendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	113,70	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	61,20	Menunjang Langsung Pencapaian Sasaran	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2

Sumber : Badan Pendapatan Daerah



## *LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022*

Sasaran tahun 2022 ada yang sudah tercapai dan ada yang tidak tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan, dari 2 (dua) sasaran capaian tertinggi adalah sasaran ke-2 meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja didukung 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan capaian target sasaran untuk Indeks Kepuasan Masyarakat telah tercapai 101,30% sedangkan untuk Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah tercapai 81,28%.

Sasaran yang tidak tercapai yaitu meningkatnya penerimaan pajak daerah yang didukung 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berbagai upaya telah dilakukan melalui pendataan ke lapangan, kerjasama dengan BPN dalam pembuatan peta ZNT, pemanfaatan data peta ZNT. penagihan aktif di desa dan dusun (door to door), penertiban reklame & penempelan stiker untuk restoran dan bangunan yang belum membayar pajak, penyampaian surat pemberitahuan tunggakan pajak daerah, stimulus keringanan pelunasan pajak tanpa denda dan perpanjangan jatuh tempo, melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam hal penagihan tunggakan pajak daerah.



### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>44.864.710.820,-</b>	<b>43.270.575.590,-</b>	<b>94,91</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.874.800,-	15.540.000,-	38,02
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.058.124.676,-	38.503.737.576,-	99,27
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193.692.400,-	191.155.000,-	98,69
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.927.154.152,-	2.430.968.059,-	83,05
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.778.296,-	328.400.000,-	50,93
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.087.696,-	962.507.170,-	88,87
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	916.998.800,-	838.267.785,-	91,41
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>15.779.757.224,-</b>	<b>14.156.950.711,-</b>	<b>89,72</b>
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.779.757.224,-	14.156.950.711,-	89,72

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Dapat terlihat pada tabel di atas, bahwa serapan anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ke-2 meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 94,91%. Dengan struktur tersebut, untuk mendukung langsung kegiatan pencapaian sasaran strategis terealisasi 12,60% dari jumlah realisasi anggaran, selebihnya merupakan gaji dan tunjangan sebesar 87,39%. Sedangkan untuk pencapaian kinerja sasaran ke-1 meningkatnya penerimaan pajak daerah melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah serapan anggarannya sebesar 89,72%.





## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022. Penyusunan LKIP ini merupakan Langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 1 (satu) sasaran strategis tercapai dengan kategori sangat tinggi dan 1 (satu) sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan Kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah belum tergalinya semua potensi pajak daerah, kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, belum adanya reward dan punishment bagi wajib pajak, dan kualitas penagihan piutang masih belum maksimal.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemutakhiran pajak daerah dengan mewujudkan bank data potensi pajak daerah.
2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
3. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.
4. Menyelenggarakan sistem penerimaan daerah secara online.



***LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022***

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah kepada pihak-pihak terkait baik dengan *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam,      Februari 2023  
**Plt.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710616 199803 1 009**



### **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas pemerintah daerah tahun 2022 difokuskan untuk menjamin ketersediaan bidang kesehatan, bantuan sosial, dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19, serta pengendalian inflasi. Meskipun demikian Badan Pendapatan Daerah tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, Februari 2023

**Plt.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710616 199803 1 009**



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah kepada pihak-pihak terkait baik dengan stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, Februari 2023

**Plt.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710616 199803 1 009**

LAMPIRAN



# **LAMPIRAN**



# **PERJANJIAN KINERJA**



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP**  
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASHARI TAMBUNAN**  
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, 2022

**Pihak Kedua**  
  
**ASHARI TAMBUNAN**

**Pihak Pertama**  
  
**H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP**  
**NIP. 19731211 199303 1 005**



**LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	74 Poin

	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>43.896.475.897</b>	APBD
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	<b>16.180.043.824</b>	APBD

Lubuk Pakam, 2022

Bupati Deli Serdang  
  
**ASHARI TAMBUNAN**

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Deli Serdang  
  
**H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP**  
**NIP. 19731211 199303 1 005**





# **MATRIKS RENSTRA**

**MATRIKS RENSTRA**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN SKPD**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
I	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	5%		5%		5%		5%		5%		25%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	-	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah		100%	10567	100%	13499	100%	16180	100%	16398	100%	16758	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	10567	100%	13499	100%	16180	100%	16398	100%	16758	100%	Kabid Pajak Daerah, Kabid PBB, Kabid BPHTB dan Kabid Renbang	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Data Potensi Pajak Daerah		2639 WP	0	2954 WP	0	0	0	3368 WP	27	3617 WP	28		Kasubbid Perencanaan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang disusun		4 Kebijakan	0	5 Kebijakan	574	7 Kebijakan	58	7 Kebijakan	63	7 Kebijakan	65		Kasubbid Pengembangan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah		0	60 Orang	5085	500 Orang	273	500 Orang	353	500 Orang	364			Kasubbid Perencanaan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		5 Jenis	122	6 Jenis	0			8 Jenis	440	9 Jenis	453		Kasubbid Pajak Daerah, PBB, BPHTB dan Renbang	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah Baru yang Terdata		338 WP	3708	363 WP	0	363 WP	6199	438 WP	6920	481 WP	7,128		Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah		3 Aplikasi	221	4 Aplikasi	578	4 Aplikasi	646	4 Aplikasi	217	4 Aplikasi	224		Kasubbid Pengembangan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.07	Penetapan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak PBB yang Terdata dan Dinilai		15953 OP PBB	0	16112 OP PBB	887	16134 OP PBB	685	17375 OP PBB	564	18195 OP PBB	581		Kasubbid Pendataan dan Penilaian PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah yang Ditetapkan	Jumlah WP Pajak Daerah yang Ditetapkan		2456 WP	554	2456 WP	6244	2491 WP	114	2493 WP	675	2516 WP	695		Kasubbid Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP yang Terlayani		34031 WP	0	35119 WP	0	35119 WP	98	38355 WP	130	40175 WP	134		Kasubbid Penagihan dan Pembukuan BPHTB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Verifikasi dan Validasi		18078 WP	629	18985 WP	0	18985 WP	623	20980 WP	669	21980 WP	689		Kasubbid Verifikasi dan Validasi BPHTB	Kab. Deli Serdang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP yang Tertagih		418945 WP	5219	442139 WP	131	449671 WP	6272	505617 WP	5978	537939 WP	6,157		Kasubbid Penagihan dan Pembukuan Pajak PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah SPPT dan WP Keberatan		411377 WP	0	431975WP	0	431975 WP	591	466975 WP	25	486975 WP	26		Kasubbid Penetapan dan Keberatan PBB	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Data Evaluasi & Pelaporan Pajak Daerah		12 Bulan	114	12 Bulan	0	12 Bulan	544	12 Bulan	105	12 Bulan	108		Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi		12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	76	12 Bulan	232	12 Bulan	107		Kasubbid Retribusi Daerah & Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintahan Propinsi	Kab. Deli Serdang
II	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	77 poin		78 poin		79 poin		80 poin		81 poin	-	81 poin	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	77 poin		78 poin		79 poin		80 poin		81 poin	-	81 poin	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	3623	100%	3427	100%	5035	100%	5503	100%	5907	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	22	100%	75	100%	194	100%	194	100%	200	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		110 Stel	22	0	75	100 Stel	194	110 Stel	194	110 Stel	200		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan		100%	1738	100%	1296	100%	2421	100%	2643	100%	2722	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor		3 Jenis	2	3 Jenis	14	2 Jenis	13	3 Jenis	15	3 Jenis	15		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Jenis	501	10 Jenis	157	10 Jenis	503	10 Jenis	496	10 Jenis	511		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		17 Jenis	397	17 Jenis	339	17 Jenis	346	17 Jenis	362	17 Jenis	373		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		4 Jenis	213	4 Jenis	22	5 Jenis	147	5 Jenis	181	5 Jenis	186		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		4020 eks	45	4020 eks	53	4020 eks	53	4020 eks	53	4020 eks	55		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu		7 jenis	97	7 jenis	16	7 jenis	55	7 jenis	51	7 jenis	53		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		815 OH	483	815 OH	695	815 OH	1305	815 OH	1485	815 OH	1,530		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>373</b>	<b>100%</b>	<b>560</b>	<b>100%</b>	<b>816</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kab. Deli Serdang</b>
				5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan			<b>0</b>		<b>0</b>			2 Unit	54	2 Unit	300		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		5 Jenis	8	5 Jenis	0	5 Jenis	373	5 Jenis	332	5 Jenis	342		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								8 Unit	174	8 Unit	174		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1230</b>	<b>100%</b>	<b>1151</b>	<b>100%</b>	<b>1129</b>	<b>100%</b>	<b>1248</b>	<b>100%</b>	<b>1285</b>	<b>100%</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kab. Deli Serdang</b>
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Materai		1400 Buah	8	2000 Buah	14	2000 Buah	20	2000 Buah	20	2000 Buah	21		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air dan Listrik		3 Jenis	731	3 Jenis	554	3 Jenis	556	3 Jenis	577	3 Jenis	594		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50 Unit	103	50 Unit	28	180 Unit	138	50 Unit	253	50 Unit	261		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Petugas Kebersihan dan Keamanan		130 OB	388	130 OB	555	130 OB	415	130 OB	398	130 OB	410		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>		<b>90%</b>	<b>625</b>	<b>90%</b>	<b>905</b>	<b>100%</b>	<b>920</b>	<b>90%</b>	<b>858</b>	<b>90%</b>	<b>884</b>	<b>90%</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kab. Deli Serdang</b>

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Data Capaian pada tahun Awal	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggungja wab	Lokasi dan Kelompok sasaran
								Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)	Target	Pendanaan (Juta Rupiah)			
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara		20 Unit	595	20 Unit	674	20 Unit	748	21 Unit	782	21 Unit	805		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara		1100 m <sup>2</sup>	30	1100 m <sup>2</sup>	174	1100 m <sup>2</sup>	172	1100 m <sup>2</sup>	58	1100 m <sup>2</sup>	60		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara		3 Jenis	0	3 Jenis	57			3 Jenis	18	3 Jenis	19		Kasubbag Umum	Kab. Deli Serdang
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah					70 poin		72 poin		74 poin		76 poin		78 poin		78 poin	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	38339	100%	37571	100%	38857	100%	39765	100%	40958	100%	Kepala Badan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	0	100%	0	100%	53	100%	68	100%	70	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan		2 Jenis	0	2 Jenis	0	2 Jenis	32	2 Jenis	40	2 Jenis	41		Kasubbag Program	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen / Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah		1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	22	1 Dokumen	28	1 Dokumen	29		Kasubbag Program	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	38339	100%	37571	100%	38804	100%	39697	100%	40888	100%	Sekretaris	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		135 OB	37896	104 OB	37108	132 OB	38070	135 OB	39000	135 OB	40,170		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan		135 OB	371	135 OB	218	132 OB	445	132 OB	411	132 OB	423		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		45 Set	72	45 Set	245	45 Set	289	45 Set	286	45 Set	295		Kasubbag Keuangan	Kab. Deli Serdang



# **PERUBAHAN MATRIKS RENSTRA**

**PERUBAHAN MATRIKS RENSTRA  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN SKPD  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
INDIKATOR KEMENDAGRI 050/5889**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
I	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan PAD					5%		5%		5%		5%		Bapenda	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah					100%		100%		100%		100%		Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02:04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	15,780	100%	16,455	100%	18,253	100%	18,253	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	15,780	100%	16,455	100%	18,253	100%	18,253	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	-	0	2 Dokumen	24	2 Dokumen	26	2 Dokumen	26	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100%	8 Dokumen	57	10 Dokumen	62	10 Dokumen	69	10 Dokumen	69	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	2 Laporan	442	8 Laporan	448	8 Laporan	498	8 Laporan	498	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	35 Unit	339	33 Unit	440	12 Unit	488	12 Unit	488	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100%	17307 Laporan	6,078	17430 Laporan	6,864	17547 Laporan	7,620	17547 Laporan	7,620	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	19800 Laporan	391	20725 Laporan	290	21550 Laporan	322	21550 Laporan	322	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100%	60 Objek Pajak	1,219	2500 Objek Pajak	553	5000 Objek Pajak	614	5000 Objek Pajak	614	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	455987 Dokumen	115	456587 Dokumen	675	517187 Dokumen	749	517187 Dokumen	749	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	62540 Layanan	89	63560 Layanan	121	64631 Layanan	135	64631 Layanan	135	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	50873 Dokumen	546	56883 Dokumen	658	62949 Dokumen	730	62949 Dokumen	730	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	473835 Dokumen	5,614	505617 Dokumen	5,978	537939 Dokumen	6,636	537939 Dokumen	6,636	Bapenda	Kab. Deli Serdang



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	50 Dokumen	535	30 Dokumen	26	20 Dokumen	29	20 Dokumen	29	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	17083 Dokumen	279	18051 Dokumen	82	19098 Dokumen	90	19098 Dokumen	90	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	384 Laporan	74	384 Laporan	232	384 Laporan	246	384 Laporan	246	Bapenda	Kab. Deli Serdang
II	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat				79%		80%		81%		81%		Bapenda	Kab. Deli Serdang
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat				79%		80%		81%		81%		Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat		79 Poin	5,767	80 Poin	5,593	81 Poin	5,873	81 Poin	5,873	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	194	100%	75	100%	78	100%	78	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	4 Paket	194	1 Paket	75	1 Paket	78	1 Paket	78	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100%	100%	2,927	100%	2,607	100%	2,738	100%	2,738	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	3 Paket	14	4 Paket	15	4 Paket	16	4 Paket	16	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	19 Paket	670	21 Paket	470	20 Paket	493	20 Paket	493	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	19 Paket	346	34 Paket	356	34 Paket	373	34 Paket	373	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	9 Paket	188	9 Paket	180	9 Paket	189	9 Paket	189	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	4020 Dokumen	53	4020 Dokumen	53	4050 Dokumen	55	4050 Dokumen	55	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	12 Laporan	55	12 Laporan	51	12 Laporan	54	12 Laporan	54	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	84 Laporan	1,602	84 Laporan	1,483	84 Laporan	1,557	84 Laporan	1,557	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	645	100%	807	100%	848	100%	848	Bapenda	Kab. Deli Serdang
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	1 Unit	281	1 Unit	295	1 Unit	310	1 Unit	310	Bapenda	Kab. Deli Serdang
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	1 Unit	275	1 Unit	300	2 Unit	315	2 Unit	315	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	143 Unit	370	154 Unit	332	160 Unit	349	160 Unit	349	Bapenda	Kab. Deli Serdang
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	0	8 Unit	175	10 Unit	184	10 Unit	184	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100%	100%	1,083	100%	1,245	100%	1,307	100%	1,307	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	500 Laporan	10	375 Laporan	17	390 Laporan	18	390 Laporan	18	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	25 Laporan	556	24 Laporan	577	24 Laporan	606	24 Laporan	606	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	206 Laporan	143	98 Laporan	253	150 Laporan	266	150 Laporan	266	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	40 Laporan	374	42 Laporan	398	45 Laporan	417	45 Laporan	417	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100%	90%	917	90%	858	90%	901	90%	901	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	20 Unit	746	21 Unit	782	21 Unit	821	21 Unit	821	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	1 Unit	171	1 Unit	58	1 Unit	61	1 Unit	61	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	-	-	30 Unit	18	47 Unit	19	47 Unit	19	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	5.02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		74 Poin	39,099	76 Poin	38,283	78 Poin	40,198	78 Poin	40,198	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100%	100%	41	100%	69	100%	72	100%	72	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5 Dokumen	25	5 Dokumen	40	5 Dokumen	43	5 Dokumen	43	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2 Laporan	16	2 Laporan	28	2 Laporan	29	2 Laporan	29	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	39,058	100%	38,215	100%	40,125	100%	40,125	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1428 Orang/Bulan	38,367	1680 Orang/Bulan	37,477	1470 Orang/Bulan	39,351	1470 Orang/Bulan	39,351	Bapenda	Kab. Deli Serdang
				5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	130 Dokumen	444	130 Dokumen	452	140 Dokumen	475	140 Dokumen	475	Bapenda	Kab. Deli Serdang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
				5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1 Laporan	247	1 Laporan	286	1 Laporan	300	1 Laporan	300	Bapenda	Kab. Deli Serdang



*LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022*

# **LAPORAN PENCAPAIAN PAJAK DAERAH**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
TA 2022**

NO	JENIS PENERIMAAN	P. APBD 2022	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2022	%	CARA PERHITUNGAN	HASIL
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7
<b>PAJAK DAERAH</b>						
1.	Pajak Hotel	8.247.975.000,00	5.997.886.543,00	72,72	5.997.886.543,00 x 100% = 8.247.975.000,00	72,72%
2.	Pajak Restoran	38.750.000.000,00	35.612.706.786,00	91,90	35.612.706.786,00 x 100% = 38.750.000.000,00	91,90%
3.	Pajak Hiburan	5.200.000.000,00	6.231.245.474,00	119,83	6.231.245.474,00 x 100% = 5.200.000.000,00	119,83%
4.	Pajak Reklame	17.500.000.000,00	11.283.642.306,00	64,48	11.283.642.306,00 x 100% = 17.500.000.000,00	64,48%
5.	Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000,00	203.334.563.003,00	68,90	203.334.563.003,00 x 100% = 295.105.000.000,00	68,90%
6.	Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000.000,00	1.042.473.810,00	3,47	1.042.473.810,00 x 100% = 30.000.000.000,00	3,47%
7.	Pajak Parkir	13.000.000.000,00	6.645.503.456,00	51,12	6.645.503.456,00 x 100% = 13.000.000.000,00	51,12%
8.	Pajak Air Tanah	18.000.000.000,00	22.128.115.376,40	122,93	22.128.115.376,40 x 100% = 18.000.000.000,00	122,93%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	10.600.000,00	14,13	10.600.000,00 x 100% = 75.000.000,00	14,13%
10.	PBB Perkotaan dan Pedesaan	507.219.272.055,00	217.199.292.039,00	42,82	217.199.292.039,00 x 100% = 507.219.272.055,00	42,82%
	- Pokok Tahun Berjalan	255.000.000.000,00	190.812.885.173,00	74,83	190.812.885.173,00 x 100% = 255.000.000.000,00	74,83%
	- Pokok Piutang	252.219.272.055,00	26.386.406.866,00	10,46	26.386.406.866,00 x 100% = 252.219.272.055,00	10,46%
11.	Pajak BPHTB	268.500.000.000,00	258.172.195.926,00	96,15	258.172.195.926,00 x 100% = 268.500.000.000,00	96,15%
	<b>TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>1.201.597.247.055,00</b>	<b>767.658.224.719,40</b>	<b>63,89</b>	<b>767.658.224.719,40 x 100% = 1.201.597.247.055,00</b>	<b>63,89%</b>

Lubuk Pakam, Februari 2023  
Pit.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG

  
**MUNAMMAD SALIM, SP, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 197106161998031009**





# **LHE SAKIP BADAN PENDAPATAN DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514  
Telepon (061) - 7951646 Faks. (061) - 7951646  
E-mail : inspektoratdeliserdang@gmail.com

Lubuk Pakam, 31 Agustus 2022

Nomor : 700 / LHE . 48 . 18 / INSP / 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : (1) Satu Berkas  
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (SAKIP) pada Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten  
Deli Serdang Tahun 2021**

Kepada

Yth. **Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Deli  
Serdang**

Di-

Lubuk Pakam

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. PENDAHULUAN

##### a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 094/DD/146/2022 tanggal 24 Juni 2022.

##### b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi pelaksanaan SAKIP

- e) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

### 3. PENUTUP

a. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 masuk dalam kategori *baik* dengan *predikat B (60,15)*. Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, seperti Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**H. EDWIN NASUTION, SH, CGCAE**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19741221 199803 1 010

**Tembusan disampaikan Kepada:**

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang



*LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022*

# **LAPORAN IKM BAPENDA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat Nya, sehingga Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dapat dilaksanakan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai aturan new normal.

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2022 disusun persemester dijadikan bahan penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk itu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui penyebaran kuesioner telah dilaksanakan sejak awal Tahun 2022 dengan nilai IKM pada semester I adalah 80,23.

Kondisi pandemik menjadi motivasi untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan pembenahan kepada masyarakat melalui peran aktif petugas pajak daerah pada Loker Pelayanan Pajak Daerah di Kantor UPT wilayah Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang maupun secara langsung pengisian kuesioner ke masyarakat guna menyelaraskan kemampuan pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Melalui hasil survey ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan harapan adanya masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun, sehingga dapat meningkatkan pelayanan serta menjadi pedoman kepada semua pihak. Kami juga mengharapkan bahwa hasil pengukuran kepuasan masyarakat ini dapat dijadikan dasar penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, Desember 2022

**Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710616 199803 1 009**

6. Ketepatan pelayanan dinilai “sesuai” oleh pengguna layanan sebanyak 65,0%.
7. Kemampuan/Kompetensi pelayanan dinilai “kompeten” oleh pengguna layanan sebanyak 58,5%.
8. Kesopanan dan Keramahan pelayanan dinilai “sopan dan ramah” oleh pengguna layanan sebanyak 66,1%.
9. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan dinilai “baik” oleh pengguna layanan sebanyak 60,8%.
10. Pengguna pelayanan dalam hal penanganan pengaduan pelayanan memberikan pendapat “ada tetapi tidak maksimal” sebanyak 42,2%.
11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori “BAIK” dari 11 jenis pelayanan pajak daerah dengan Nilai Rata-Rata (NRR) sebesar **80,03**. Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat per Unit Pelayanan sebagai berikut :

### **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNIT PELAYANAN**

NO	JENIS/UNIT PELAYANAN	IKM PER UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN
1	PAJAK HOTEL	78,19	BAIK
2	PAJAK RESTORAN	80,02	BAIK
3	PAJAK HIBURAN	81,07	BAIK
4	PAJAK REKLAME	78,96	BAIK
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	84,18	BAIK
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	77,70	BAIK
7	PAJAK PARKIR	77,41	BAIK
8	PAJAK AIR TANAH	79,31	BAIK
9	PAJAK SARANG BURUNG WALET	86,03	BAIK
10	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	76,28	KURANG BAIK
11	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BATUAN	81,22	BAIK
	<b>NILAI RATA RATA (NRR)</b>	<b>80,03</b>	<b>BAIK</b>
	<b>MUTU PELAYANAN</b>	<b>BAIK</b>	<b>BAIK</b>



# **TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2021**

**TANGGAPAN/TINDAKLANJUT LHE SAKIP  
TAHUN 2021**

NO	REKOMENDASI TA 2021	TINDAK LANJUT
a.	Perencanaan Kinerja	
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja ke website OPD tepat waktu	Dokumen Renja dan RKA/DPA tahun 2022 telah dipublikasikan tepat waktu
2	Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan seluruh kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	Kualitas dokumen Renja telah menggambarkan seluruh kebutuhan untuk pencapaian kinerja
3	Meningkatkan kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	Kualitas rumusan sasaran telah menggambarkan kondisi sebenarnya yang akan dicapai
4	Meningkatkan kualitas penetapan target dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis	Penetapan target sasaran utama kinerja Bapenda harus 100% untuk memastikan seluruh program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang dapat dilaksanakan.
5	Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)	Penyempurnaan cascading berikut indikatornya yang disesuaikan dengan Kepmendagri 050/5889 tahun 2021
6	Meningkatkan kualitas Perencanaan Kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Hubungan kinerja antar bidang/fungsi lain (crosscutting) dapat dilihat pada pohon kinerja Bapenda.
7	Menetapkan Anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai	Anggaran mendukung pencapaian sasaran kinerja
8	Melaksanakan aktivitas yang mendukung Kinerja yang ingin dicapai	Berbagai aktivitas dan upaya dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja
9	Melaksanakan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dengan capaian yang baik dan on the right track	Capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
10	Memastikan rencana aksi kinerja berjalan dengan dinamis dan capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	Capaian penerimaan pajak daerah dipantau setiap hari dari laporan harian pajak daerah untuk rencana aksi selanjutnya
11	Memuat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Renja telah memuat analisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya
12	Memuat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Renja telah memuat perbaikan untuk mewujudkan hasil yang lebih baik
13	Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada setiap unit/satuan kerja, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Semua pejabat eselon dan fungsional membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) untuk mendukung pencapaian kinerja
14	Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada setiap Pegawai, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Pembuatan dan penandatanganan PK sampai jabatan pelaksana (staf) untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan
b	Pengukuran Kinerja	
1	Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	SOP pengumpulan data kinerja telah disusun
2	Mengumpulkan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja	Data kinerja pejabat eselon & fungsional telah dikumpulkan per triwulan untuk mengukur pencapaian kinerja
3	Mengumpulkan data kinerja yang mendukung capaian kinerja	Data kinerja pegawai telah dikumpulkan yang mendukung capaian kinerja
4	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala	Pengukuran kinerja sasaran utama Bapenda dilakukan setiap hari, triwulan, semester, dan tahunan
5	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada level organisasi	Pemantauan capaian pajak daerah dilakukan setiap hari dengan penyampaian laporan harian pajak daerah kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kaban, Sekban, dan Bidang-bidang terkait



NO	REKOMENDASI TA 2021	TINDAK LANJUT
6	Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Peraturan yang ada hanya mengatur penyesuaian tunjangan kinerja/ penghasilan berdasarkan jabatan
7	Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional	Usulan jabatan struktural menjadi fungsional telah dilaksanakan
8	Menjadikan Pengukuran Kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi	Penyesuaian organisasi belum dirasa perlu pada saat ini
9	Menjadikan Pengukuran Kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja	Realisasi pajak daerah dibuat dan dibagikan setiap hari untuk menentukan aktivitas selanjutnya
10	Menjadikan Pengukuran Kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja	Pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian anggaran pada P.APBD
11	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Tahun 2022 efisiensi anggaran sebesar 5,30%
12	Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada setiap unit/satuan kerja atas hasil pengukuran kinerja	Hasil pengukuran kinerja berupa laporan harian pajak daerah dibagikan setiap hari ke bidang terkait
13	Memberikan pemahaman atas kepedulian kepada setiap pegawai atas hasil pengukuran kinerja	Rapat evaluasi kinerja dengan seluruh staf dan amanat apel setiap senin pagi
c	Pelaporan Kinerja	
1	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai dengan standar	Laporan telah disusun sesuai standar dan berkualitas
2	Memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Dokumen Laporan Kinerja	Realisasi kinerja dengan target RPJMD telah dibuat dalam dokumen LKIP 2022
3	Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada seluruh pegawai terhadap Penyajian informasi dalam laporan kinerja	Menyusun tim LKIP dan melibatkan staf serta mengumpulkan data dari semua pegawai pada realisasi PK pegawai
4	Menjadikan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Laporan kinerja harian pajak daerah untuk penyesuaian aktivitas selanjutnya
5	Menjadikan Informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Laporan kinerja berkala dalam penyesuaian anggaran pada perubahan struktur P.APBD
6	Menjadikan Informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Adanya agen perubahan dan pada apel pagi disampaikan mengenai budaya kinerja untuk pencapaian target
d	Evaluasi Akuntabel Kinerja Internal	
1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sudah ditindak lanjuti
2	Meningkatkan Implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kuantabilitas Kinerja internal	Sudah dipedomani dan dilaksanakan
3	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah dipedomani dan ditingkatkan akuntabilitas kinerjanya
4	Memanfaatkan Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Efektifitas dan efisiensi kinerja telah ditingkatkan
5	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Capaian kinerja telah ditingkatkan

Lubuk Pakam, Februari 2023  
**PI. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**  
  
**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710616 199803 1 009**